



## Dua Eks Kadispenda Bangli dalam Kasus UP Jaksa-Terdakwa Menerima, Putusan *Incraht*

DENPASAR, NusaBali

Tujuh hari pasca putusan untuk dua terdakwa kasus Upah Pungut (UP) Sektor Pertambangan Kabupaten Bangli, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangli akhirnya menyatakan menerima putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pimpinan Sutrisno.

Dalam putusan yang dibacakan pada, Senin (27/2) lalu, terdakwa AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadipenda Bangli 2009-2010) divonis 2 tahun empat bulan dan Bagus Rai Dharmayudha (mantan Kadispenda Bangli 2006-2008 yang kini sudah pensiun) dihukum 2 tahun 8 bulan. "Kami menerima putusan tersebut," ujar Kasi Intel dan Humas Kejari Bangli, Mahriyanto saat dihubungi, Senin (6/3).

Dengan putusan JPU yang menyatakan menerima putusan tersebut, maka putusan untuk dua terdakwa *incraht* alias sudah berkekuatan hukum tetap. Pasalnya, mantan Kadispenda Bangli yang menjadi terdakwa, yaitu Darmawan dan Dharmayudha lebih dulu menyatakan menerima putusan.

Selain itu, JPU juga diberi PR (Pekerjaan Rumah) oleh majelis hakim untuk menagih UP Sektor Pertambangan yang dibagikan selama rentang waktu 2006-2010. Dalam dakwaan disebut, untuk tahun 2006 ada upah pungut Rp 85.058.014 yang dibagikan kepada 85 petugas upah pungut termasuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kadispenda. Untuk tahun 2007 disebutkan ada upah pungut Rp 233.067.746 yang dibagikan kepada 91 staf dan pejabat Kabupaten Bangli.

Pada 2008 ada UP Rp 215.580.156 yang dibagikan kepada 91 petugas upah pungut. Sementara pada 2009 ada upah pungut Rp 203.832.554 yang dibagikan kepada 87 petugas upah pungut. Terakhir pada 2010 ada upah pungut Rp 188.537.200 yang dibagikan kepada 91 petugas upah pungut.  rez

Edisi : Selasa 7 Maret 2017

Hal

: 5



## Anggota Dewan Minta Tunjangan Dana Perumahan Rp 40 Juta/Bulan

★ Sebelum Paripurna, Pimpinan Dewan-Gubernur Rapat Dulu

DENPASAR, NusaBali

Di tengah rencana Pemprov Bali melakukan rasionalisasi anggaran menyusul masih kurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sekitar Rp 246 miliar karena beban kelola SMA/SMK, muncul keinginan dari anggota DPRD Bali untuk menambah dana tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan itu diusulkan naik 100 persen dari Rp 20 juta menjadi Rp 40 juta per bulan.

Keinginan menaikkan tunjangan perumahan yang berawal dari anggota Dewan dari lintas fraksi tersebut, kontan membuat 'gaduh'. Bahkan, pro dan kontra terkait tunjangan perumahan Dewan ini sempat membuat antar anggota fraksi DPRD Bali perang dan saling hujat di media sosial.

Sumber NusaBali di DPRD Bali menyebutkan, anggota Dewan seperti adu kesaktian soal pemahaman aturan dan perundang-undangan terkait dana tunjangan perumahan, yang kini jadi 'bola panas' tersebut. Bahkan, wacana tersebut sampai jadi bahasan jelang Sidang Paripurna DPRD Bali yang mengagendakan laporan Pansus di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (6/3).

"Ribut di grup WA (Whatsapp) DPRD Bali. Masa urusan tunjangan perumahan ribut di

## Anggota Dewan Minta Tunjangan...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

WA?" ujar sumber NusaBali di Gedung DPRD Bali, Senin kemarin. Bahkan, sempat ada isu urusan tunjangan perumahan dari Rp 20 juta menjadi Rp 40 juta per bulan ini bakal dimunculkan melalui interupsi di Sidang Paripurna Dewan, Senin kemarin.

Namun, pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Bali berhasil meredam anggotanya supaya tidak sampai terjadi interupsi soal dana tunjangan perumahan yang diusulkan naik 100 persen tersebut. Sidang Paripurna DPRD Bali sendiri sempat molor dari jadwal semula dimulai pukul 10.00 Wita menjadi pukul 10.45 Wita. Pasalnya, lebih dulu digelar rapat antara Pimpinan Dewan dan Gubernur Made Mangku Pastika di Ruang Transit DPRD Bali.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Gunawan, yang dikonfirmasi NusaBali soal rapat Pimpinan Dewan dan Gubernur di Ruang Transit kemarin pagi, mengatakan tidak ada pembahasan soal tunjangan perumahan. "Rapat itu hanya membahas soal be-bah rumah," ujar politisi Golkar asal Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini se-suai Sidang Paripurna

kemarin siang.

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana, yang dikonfirmasi soal isu keinginan menaikkan tunjangan perumahan bagi anggota Dewan, mengatakan memang sempat ada selisih paham. Namun, hal itu tidak diungkap di forum resmi. "Ah, itu (kenaikan tunjangan perumahan) ide yang tidak diungkap di forum resmi. Jadi, tidak bisa dijadikan acuan untuk pembahasan. Lagian, aturan juga tidak memungkinkan kenaikan 100 persen itu," ujar Kadek Diana saat ditemui NusaBali di Ruang Komisi III DPRD Bali, se-suai Sidang Paripurna Dewan kemarin.

Ditanya soal Sidang Paripurna yang sempat molor 45 menit, menurut Kadek Diana, itu terjadi bukan karena masalah isu kenaikan dana tunjangan perumahan anggota Dewan. "Bukan soal dana tunjangan perumahan, tapi masalah laporan Pansus itu. Beberapa hal yang sudah disepakati," ujar politisi PDIP asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.

Diana menegaskan, untuk saat ini, usulan agar anggaran perumahan bagi anggota Dewan memang tidak tepat. "Kalau diusulkan sekarang, terlambat karena APBD Induk

2017 sudah ketok palu. Di samping itu, ada mekanisme dan aturan juga soal kenaikan anggaran perumahan," katanya.

Mantan Sekretaris DPC PDIP Gianyar ini mengatakan, sesuai dengan PP 21 Tahun 2007 tentang Protokol dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, ada pengelompokan-pengelompokan mengacu dengan kemampuan keuangan daerah, PAD, DAU, dan belanja pegawai. "Dalam pengelompokan keuangan daerah itu ada tinggi, sedang, rendah," tegas Diana.

"Teman-teman di Dewan ada yang berpedoman dengan jumlah penduduk, ya tidak masuk rumusnya. Salah besar," lanjut Diana sembari mengaku sempat berselisih paham dengan anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari NasDem, I Nyoman Tirtawan, soal aturan dana perumahan.

Sayangnya, Nyoman Tirtawan yang dikonfirmasi se-suai Sidang Paripurna kemarin, menolak berkomentar soal adanya pro dan kontra dana tunjangan perumahan bagi anggota Dewan. Politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Swan, Buleleng ini menolak komentar Tketika ditanya adanya wacana interupsi di Sidang Paripurna kemarin. **nat**

Edisi : Selasa, 7 Maret 2017.

Hal : 1.



## Kasus Dugaan Penyelewengan Dana KKPE Rp 1 M Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP

Setelah hasil audit dari BPKP turun, maka kami langsung akan menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini.

GIANYAR, NusaBali

Kasus dugaan penyelewengan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Rp 1 miliar yang melibatkan Kelompok Tani Ternak Dharma Canti Banjar Kes-

ian, Desa Lebih, Gianyar, masih bergulir. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Denpasar.

Hasil audit ini untuk menentukan berapa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh para calon tersangka kasus tersebut. Hal itu diungkapkan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar Made Endra Arianto SH, Senin (6/3).

Dikatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan pemeriksaan kerugian negara ke BPKP

terhadap bantuan senilai Rp 1 miliar untuk 20 anggota kelompok tani ternak itu. "Sekarang ini kami sedang menunggu hasil audit BPKP, setelah hasil audit dari BPKP turun, maka kami langsung akan menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini," ujar Endra Arianto.

Lanjut Endra, untuk menguatkan penyelidikan kasus itu, pihaknya telah memeriksa saksi ahli untuk memastikan ada atau tidak pihak yang bertindak melawan hukum. Endra pun masih enggan mengatakan siapa saja yang

patut menjadi tersangka. Alasannya, semua demi kepentingan penyelidikan. "Yang jelas kami sudah kantongi siapa tersangkanya bisa lebih dari satu," jelasnya.

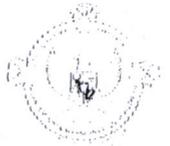
Namun Endra memberikan sinyal jika tersangkanya nanti bisa dari peternak asli dan juga dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti diketahui, PNS pun ikut menerima bantuan KPPE yang mana diperuntukkan bagi peternak.

Sebelumnya, kasus ini terkuak ke permukaan berkat laporan warga dari Banjar Kesian, Desa Lebih, Gianyar. Inti materi laporannya,

di Banjar Kesian ada warga yang diduga kurang berhak menerima bantuan KKPE padahal bukan anggota kelompok tani ternak.

Sebagaimana diketahui, salah satu syarat penerima bantuan KKPE dari pemerintah itu adalah anggota kelompok petani ternak dan bukan berstatus PNS. Dalam proses penyelidikan kasus ini, penyidik telah memeriksa belasan orang baik dari unsur kelompok tani ternak hingga pejabat yang berkompeten dalam proses pencairan bantuan kredit tersebut. e

Edisi : Selasa, 7 Maret 2017  
Hal : 6



## RS Pratama Giri Emas Dilengkapi Alkes

SINGARAJA, NusaBali

Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan kembali dilanjutkan. Kali ini mulai tahap pengadaan alat kesehatan (alkes), setelah fisik bangunan rampung. Rencananya, perekrutan tenaga medis dan para medis dialokasikan dana pada APBD Perubahan 2017 nanti.

Dalam pengadaan alkes tersebut, Pemkab Buleleng menyediakan dana mencapai Rp 80 miliar.

Alkes yang dibeli nanti juga diperuntukkan melengkapi alkes di RS Pratama di Desa Tanguwisia, Kecamatan Seririt dan beberapa Puskesmas. "Kurang lebih Rp 80 miliar kita siapkan dalam pengadaan alkes tersebut. Untuk RS Pratama di Giri Emas, Tanguwisia

dan beberapa Puskesmas," terang Wakil Bupati Buleleng dr Nyoman Sutjidra, saat dikonfirmasi Senin (6/3).

Dikatakan, untuk RS Pratama di Desa Tanguwisia, kendati telah beroperasi, namun alkes yang tersedia masih perlu dilengkapi. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat wilayah Buleleng Barat lebih maksimal. Sedangkan untuk RS Pratama di Desa Giri Emas, perlu diisi alkes karena baru sebatas bangunan fisik. Demikian juga dengan alkes di beberapa Puskesmas perlu dilengkapi, apalagi ada beberapa Puskesmas dengan pelayanan rawat inap.

Wabup Sutjidra juga menyebut, terhadap RS Pratama di Desa Giri Mas selain mengisi dengan alkes dan melanjutkan penataan fisik,

rencananya juga akan merekrut tenaga medis dan para medis pada pertengahan tahun melalui alokasi dana APBD perubahan.

Langkah ini diambil karena secara keseluruhan fisik gedung dan alat kesehatan sudah dilengkapi, sehingga langkah berikutnya menyiapkan SDM-nya, sehingga rumah sakit pratama tersebut akan beroperasi untuk melayani pasien dari wilayah Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, dan Kecamatan Sawan. "Tahun ini kami sudah memasang anggaran untuk rumah sakit pratama di Seririt dan Giri Mas. Termasuk Puskesmas dengan tambah alkes-nya, sehingga bagaimana pelayanan tidak unggul secara kuantitas, namun secara mutu pelayanan dapat kita wujudkan," jelasnya. **k19**

Edisi : Selasa, 7 Maret 2017.

Hal : 4